

JURNAL

LITIGASI

Langkah-langkah Penyusunan Buku Persyaratan Sebagai Prasyarat Pendaftaran Produk Indikasi Geografis

Pemahaman Masyarakat Terhadap Bahaya Penyalahgunaan Pemakaian Kemasan Produk Makanan dan Penegakan Hukumnya

Mendobrak Kelemahan Litigasi Konvensional Melalui Model Advokasi Mandiri Dalam Rangka Pembaharuan Proses Peradilan

Pengaruh Globalisasi Ekonomi dan Hukum Ekonomi Internasional Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Di Indonesia

Pengadaan Tanah Dengan Cara Jual Beli Oleh Instansi Pemerintah Menurut Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945

Politik Hukum Pemberantasan Korupsi di Era Reformasi: Konsep dan Regulasi

AKREDITASI
No. 56/DIKTI/Kep/2012

LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN BUKU PERSYARATAN SEBAGAI PRASYARAT PENDAFTARAN PRODUK INDIKASI GEOGRAFIS

Tatty A. Ramli

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Jl. Ranggagading No. 8, Telp: 022-4203368
Psw. 403, Hp: 08122308716, E-mail: tattyramli@gmail.com

Yeti Sumiyati

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Jl. Ranggagading No. 8, Telp: 022-4203368
Psw. 403, Hp: 081320913073, E-mail: yeti_sumiyati74@yahoo.com

Arif Firmansyah

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Jl. Ranggagading No. 8, Telp: 022-4203368
Psw. 403, Hp: 0812129111244, E-mail: arifunisba05@gmail.com

Freny Siska

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Jl. Ranggagading No. 8, Telp: 022-4203368
Psw. 403, Hp: 081802202338, E-mail: freny_siska@yahoo.com

ABSTRAK

Belum terdaptarnya Beras Pandanwangi Cianjur di Dirjen HKI sebagai produk yang berkarakteristik Indikasi Geografis, mengakibatkan penegakkan hukum terhadap praktik-praktik pemalsuan produk tersebut sulit dilakukan. Kendala teknis dan kurangnya budaya pendokumentasian menyebabkan terhambatnya penyusunan Buku Persyaratan yang merupakan prasyarat Pendaftaran Hak Indikasi Geografis. Untuk itu, perlu ditemukan langkah-langkah penyusunan Buku Persyaratan melalui permasalahan apakah terdapat standarisasi dalam penyusunan Buku Persyaratan dan bagaimana langkah penyusunan Buku Persyaratan Beras Pandanwangi Cianjur. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis baru mengatur standarisasi uraian yang harus dimuat dalam Buku Persyaratan sementara standarisasi teknisnya belum diatur. Langkah penyusunan Buku Persyaratan Indikasi Geografis diawali dengan penyusunan renstra oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur dan dinas terkait untuk membentuk lembaga Masyarakat Perwakilan Indikasi Geografis (MPIG) dan distribusi tugas untuk mengisi uraian Buku Persyaratan sesuai kompetensinya.

Kata Kunci: Buku, Persyaratan, Indikasi Geografis, Pandanwangi.